

Puncak Peringatan HJB ke-542 Bakal Banjir Hadiah

CIBINONG (IM)- Ketua panitia Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542, Hadijana mengungkapkan ada empat peringatan utama mulai dari ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Pondok Rajeg Cibinong, Upacara, rapat panipurna dan penghargaan Tegar Beniman Award dan Gebyar HJB. Gebyar HJB di Stadion Pakansari, Pemkab Bogor selain diisi oleh tenan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menggelar Gebyar Produk Industri Kecil Memengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) "Di HJB Tahun 2024 ini temanya babarengan, akur dan makmur. Di mana ada empat kegiatan utama," kata Hadijana kepada wartawan, Senin (27/5).

Hadijana menuturkan pada puncak acara atau peringatan yaitu Gebyar HJB juga bakal diisi dengan kegiatan jalan sehat, senam atau menari di Bogor. Di sela-sela acara itu juga bakal diisi oleh artis untuk menghibur

masyarakat. "Kegiatan jalan sehat tersebut, Kadin Kabupaten Bogor ditunjuk sebagai panitia pelaksana," tutur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tersebut.

Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawaty menerangkan bahwa Gebyar IKM dan UMKM dan Jalan Sehat yang diselenggarakan pada Sabtu pagi 8 Juni mendatang oleh jajarannya akan dibanjiri hadiah untuk para peserta.

Para peserta jalan sehat bisa membeli tiketnya di Kantor Kadin Kabupaten Bogor dengan harga Rp 50.000,- di mana akan mendapatkan kaos dan kupon doorprize.

"Para peserta jalan sehat berpeluang mendapatkan empat tiket umroh, sepeda motor, sepeda lipat, lemari es, TV LED, kompor gas, kipas angin,

mesin cuci, rice cooker, setrika listrik, dispenser dan hadiah menarik lainnya," terang Sintha Dec Checawaty. **gio**

ASN Harus Jadi Penggerak Promosi Pariwisata Kota Bandung

BANDUNG (IM)- Kota Bandung yang merupakan kota jasa dan wisata terus berbenah meningkatkan potensi pariwisatanya. Karenanya, aparat sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus menjadi motor dalam upaya mempromosikan pariwisata di Kota Bandung.

"Bagaimanapun juga Kota Bandung adalah kota jasa dan wisata. Maka kita semua sebagai ASN tidak terpisahkan untuk senantiasa mempromosikan Kota Bandung sebagai kota yang layak dikunjungi," kata Plh Sekda Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, Senin (27/5).

Ia menyebut, saat ini Pemkot Bandung tengah menyiapkan berbagai destinasi unggulan di Kota Bandung. Di antaranya dengan mereaktivasi beberapa lokasi seperti Teras Cikapundung, Babakan Siliwangi, Teras Cihampelas, Alun-alun Bandung, serta sejumlah sentra dan kampung wisata.

"Ini merupakan salah satu langkah Pemkot Bandung memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan indeks kebahagiaan. Alhamdulillah telah dilaksanakan (reaktivasi dan reoptimisasi). Di beberapa tempat yang sedang berjalan dan sedang berproses. Semuanya akan diberikan perhatian oleh pemerintah kota, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung," ucapnya.

Hikmat menambahkan, peran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk ASN harus mempromosikan wisata Kota Bandung agar dapat menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Hal ini akan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. "Dengan menariknya Kota Bandung sebagai destinasi unggulan setidaknya akan meningkatkan PAD," ujar dia. **pra**

OPTIMALKAN KEGIATAN PEMERINTAH

Pemkab Bogor Tingkatkan Kapasitas Para Fasilitator Manajemen Risiko



Pemkab Bogor menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Fasilitator Manajemen Risiko (MR) untuk tingkatkan kinerja mereka.

BOGOR (IM)- Guna mengoptimalkan pelaksanaan tahapan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah (PD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajak para Fasilitator Manajemen Risiko tingkat Dinas dan Kecamatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya.

Ajakan itu dikumandangkan saat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Manajemen Risiko (MR), di Ole Suites Hotel, Sentul Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (27/5).

Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengungkapkan, manajemen risiko sangat penting dalam setiap pelaksanaan tahapan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Lanjut Suryanto Putra, implementasi manajemen risiko bagi Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008. Namun pelaksanaannya masih diperlukan perbaikan agar implementasinya dapat berjalan optimal dan keberlanjutannya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat.

"Kami harap Bimtek ini bisa mengoptimalkan pelaksanaan tahapan program

dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Juga menjadi sarana untuk menyepakati bentuk/format dokumen manajemen risiko terkait perencanaan pembangunan daerah, mengingat saat ini kita sedang dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2025," papar Pj. Sekda.

Menurut Pj. Sekda Kabupaten Bogor, saat ini Pemkab Bogor tengah menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pedoman pengelolaan risiko, mengacu pada peraturan-peraturan terbaru terkait manajemen risiko. Juga tengah menyusun Raperbup tentang pedoman implementasi SPIIP terintegrasi bagi perangkat daerah.

"Dalam masa transisi, substansi kedua Raperbup tersebut kami buat dalam bentuk surat edaran pejabat bupati agar perangkat daerah tetap bisa mempedomani substansinya," tegasnya. Ia juga menekankan, para Fasilitator serta Pokja Manajemen Risiko Tim Irbn 4 agar mengawal proses manajemen risiko baik di internal maupun seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor. **gio**

8 | Nusantara



PENGENALAN JAMU PELAJAR SD

Pelaku UMKM Jamu Ramu Jamu, Ginanjar Saputra, menjelaskan fungsi rempah-rempah kepada pelajar SD saat mengikuti kegiatan pengenalan jamu di halaman Kedai Ramu Jamu, Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (27/5). Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional, sejumlah pelajar SD Tambahrejo II Bandar mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan jamu, praktek tanam bibit tanaman obat, dan demo langsung membuat jamu wedang baji yang bertujuan untuk mengenalkan jamu ke generasi muda sejak usia dini.

PERSIAPAN ALGOMERASI JABODETABEKUR

Ini Cara Pemkab Bogor Mengejar Ketertinggalan dari Jakarta

Kabupaten Bogor harus berbenah, dan beberapa skenario untuk mengejar ketertinggalan dengan Jakarta maupun kota lainnya di Jaboderabekjur harus dilaksanakan demi masyarakat memiliki daya saing," ungkap Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmar Jatnika.

CIBINONG (IM)- Kabupaten Bogor akan masuk dalam Kota Aglomerasi Jabodetabekjur, pasca berpindahannya ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Demi kesejajaran den-

gan Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bogor pun bersiap mengejar ketertinggalannya. Ketertinggalannya itu, seperti rendahnya angka rata-rata lama sekolah, tingginya angka bayi stunting,

banyaknya gedung sekolah yang rusak, kurang banyaknya rumah sakit, infrastruktur dan jembatan yang kurang baik, minimnya transportasi masa lalu serta lainnya.

"Kabupaten Bogor harus berbenah, beberapa skenario untuk mengejar ketertinggalan dengan Jakarta maupun kota lainnya di Jaboderabekjur harus kita laksanakan demi masyarakat memiliki daya saing," ungkap Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmar Jatnika kepada wartawan, Senin (27/5).

Ajat Rochmar Jatnika menuturkan prinsip berkeadilan harus diterap-

kan dalam pembangunan, jangan sampai ada kecamatan atau wilayah yang tertinggal.

"Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, lalu layanan dasar lainnya seperti pendidikan serta kesehatan haruslah berkeadilan di seluruh atau 40 kecamatan," tutur Ajat Rochmar Jatnika.

Mengenai transportasi massal, selain bus by the service (BTS), Pemkab Bogor, tambah Ajat juga melakukan pengadaan bus listrik sebagai bagian dari visi berkelanjutan, dimana kendaraan massal tidak lagi menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetapi energi terbarukan.

"Kami akan lakukan program yang berkelanjutan, termasuk meng-

gunakan energi lain selain BBM dalam pengadaan transportasi massal," tambah alumni IPB University tersebut.

Ia melanjutkan, bahwa Pemkab Bogor tidak dibiarkan sendiri dalam mengejar ketertinggalannya dengan Jakarta. Bakal ada sumber anggaran atau pembiayaan lain yang bakal diupayakan.

"Kami akan upayakan mendapatkan bantuan keuangan atau anggaran, baik dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, Pempriv Jawa Barat hingga memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," lanjut Ajat Rochmar Jatnika. **gio**

Pemkab Bogor Raih Penghargaan SPBE Digital Government Award dari Kemenpan-RB

BOGOR (IM)- Sukses mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berhasil meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) RI yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat Senin (27/5).

Dalam acara Digital Government Award & Peluncuran Platform Govtech Terintegrasi dengan nama "INA Digital" Kabupaten Bogor turut diundang hadir karena menjadi salah satu dari 58 Kabupaten yang berhasil meningkatkan indeks SPBE tahun 2023 paling tinggi se-Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Diskominfo Kabupaten Bogor, Senin (27/5) bahwa penghargaan ini diberikan

sebagai bentuk penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, sebagaimana arahan Presiden RI dalam rapat kabinet internal pada 25 Maret 2024 mengenai Percepatan Transformasi dan Layanan Digital Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

Kominfo, termasuk layanan penggunaan Identitas Kepentungan Digital (IKD).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan, pemerintah hari ini meluncurkan yang namanya INA Digital sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di Indonesia, terutama transformasi digital pemerintahan. Katanya, Pemerintah Kabupaten Bogor diundang sebagai salah satu yang nilai indeks SPBE-nya di posisi sangat tinggi atau 3,7 dari angka 4 artinya mengarah ke Paripurna.

"Alhamdulillah tentu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atau pe-

nilaian yang sudah dilakukan oleh semua OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor itu menjadi penyemangat dan tantangan untuk lebih memperbaiki lagi," tegas Asmawa Tosepu sebagaimana mengutip Menpan RB.

Ia juga menambahkan, dengan pembentukan GovTech dan fokus dalam pengembangan sistem-sistem strategis seperti digital public infrastructure kita dapat meloncat jauh dalam pencapaian pembangunan digital dibanding dengan perkembangan normal tanpa keputusan ini. Penguatan Govtech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.

"Semoga program transformasi digital yang dilakukan ini dapat berdampak dan bermanfaat nyata bagi masyarakat luas dan berperan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional," Abdullah Azwar Anas mengakhiri. **gio**



Pemkab Bogor berhasil meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) dari KemenPAN-RB yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat Senin (27/5).

TIDAK ADA PASOKAN AIR 20.000 Hektare Lahan Pertanian di Pantura Subang Tak Bisa Ditanami

SUBANG (IM)- Meskipun memasuki musim tanam, hingga kini puluhan ribu hektare area lahan pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat, belum bisa ditanami padi. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya jaminan pasokan air yang memadai.

Dinas Pertanian Kabupaten Subang mencatat ada sekitar 20 ribu hektare lahan produktif belum ditanami karena kekeringan. Lahan tersebut sebagian besar berada di wilayah Pantura, seperti di Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Blanakan.

Dengan kondisi kekeringan ini, para petani tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Bahkan, sebagian lahan yang kekeringan saat ini telah dijadikan tempat menggembala ternak oleh warga.

"Airnya tidak ada. Buat menyedot air juga uangnya tidak ada. Pasokan air tidak ada, akibat adanya bangunan proyek. Kalau proyek jalan siang, malam air jalan, tetapi ini mah total tidak ada sama sekali," kata salah seorang warga Pantura, Sujudi.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Nenden Setiawati, kekeringan ini terjadi selain karena dampak dari El Nino, juga akibat lambatnya pengerjaan proyek peningkatan dan modernisasi jaringan irigasi di se-

jumlah titik di Pantura.

Untuk mengatasi kekeringan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Subang telah mengajukan bantuan mesin pompa air kepada Kementerian Pertanian sebanyak 500 unit mesin. Namun, saat ini yang baru teralisasi baru 55 unit mesin pompa air.

"Sekarang musim El Nino kemudian ada pembangunan PT Brantas, itu kan sangat memengaruhi juga terhadap para petani karena kekurangan air sehingga, kami mengusulkan ke pusat untuk memberikan pompa sebanyak mungkin," ujar kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Nenden Setiawati, Senin (27/5).

"Namun, sekarang baru ada 55 pompa yang sudah tersebar. Padahal kami membutuhkan sekitar 500-an, dan semoga bantuan ini cepat turun lagi, sehingga masalah kekeringan bisa ada solusinya," dia menambahkan.

Jika proyek tersebut tidak selesai di tahun ini pasti petani tidak bisa menanam, karena Pantura merupakan salah satu obyek yang paling utama dalam pertanian padi.

"Hampir 20.000 hektare lahan tidak bisa ditanami terutama di wilayah Ciasem dan Blanakan. Ini berarti terancam kehilangan 7 ton per hektarenya," pungkaskan Nenden. **pra**